

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi dan provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota, dimana tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintah daerahnya masing-masing. Demi mempermudah dalam mengatur dan mengurus pemerintah daerahnya masing-masing, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Otonomi Daerah. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Terselenggaranya Otonomi Daerah yang optimal didukung dengan diberlakukannya perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber-sumber pendanaan dalam pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Alhusain, dkk. (2018:2) juga mengatakan, “untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen fiskal

yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.”

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah:

Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Adanya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ini ternyata justru menjadi sebuah ketergantungan. Tidak bisa dipungkiri Pendapatan Asli Daerah di beberapa daerah provinsi di Indonesia masih jauh dibandingkan Pendapatan Transfer, ini menandakan bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut masih rendah. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, sumber pendanaan terbesar adalah Pendapatan Transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU).

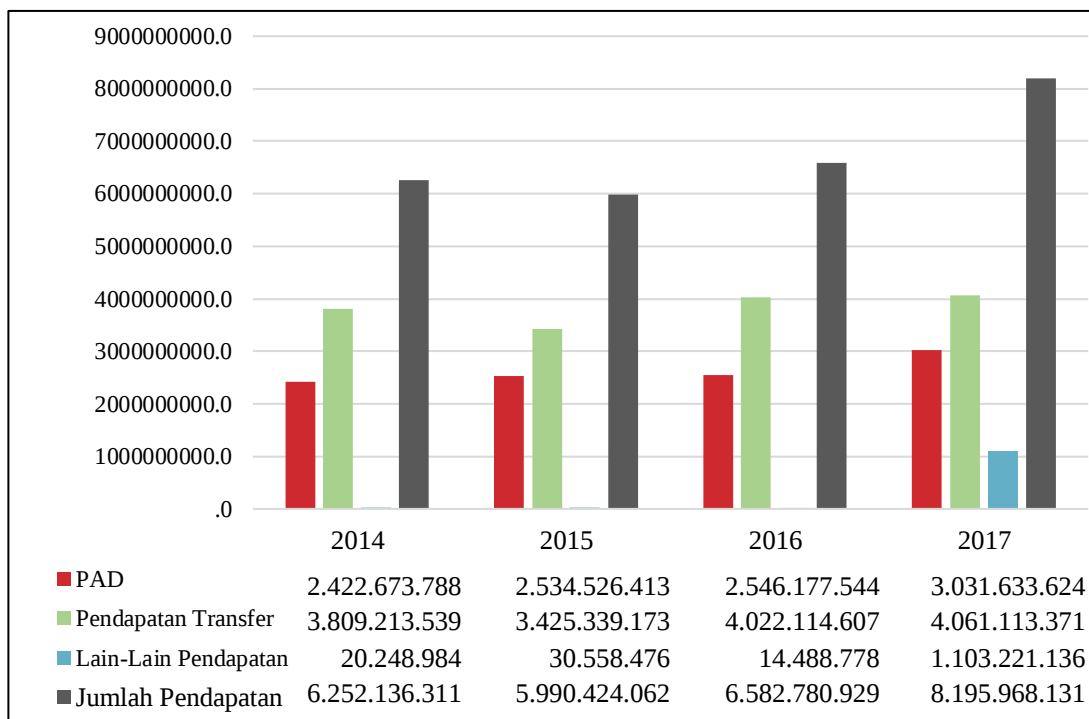
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Alhusain, dkk. (2018:57), “untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerahnya”. Ia juga mengatakan, alat analisis untuk memahami sumber pendapatan asli daerah selain PDRB adalah belanja daerah, belanja modal, dan kepadatan penduduk.

Menurut Badan Pusat Statistik Sumsel (2018:3), salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Rahmawati dalam (Halim, 2002:68) “pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam

menggerakkan perekonomian di suatu daerah”. Pengeluaran pemerintah akan menghasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian (Husna, 2015). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah termasuk faktor yang mempengaruhi pendapatan suatu daerah.

Penduduk juga dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Menurut Adipuryanti & Sudibia dalam (Irawan, 2002:23), pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Ia juga mengatakan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.



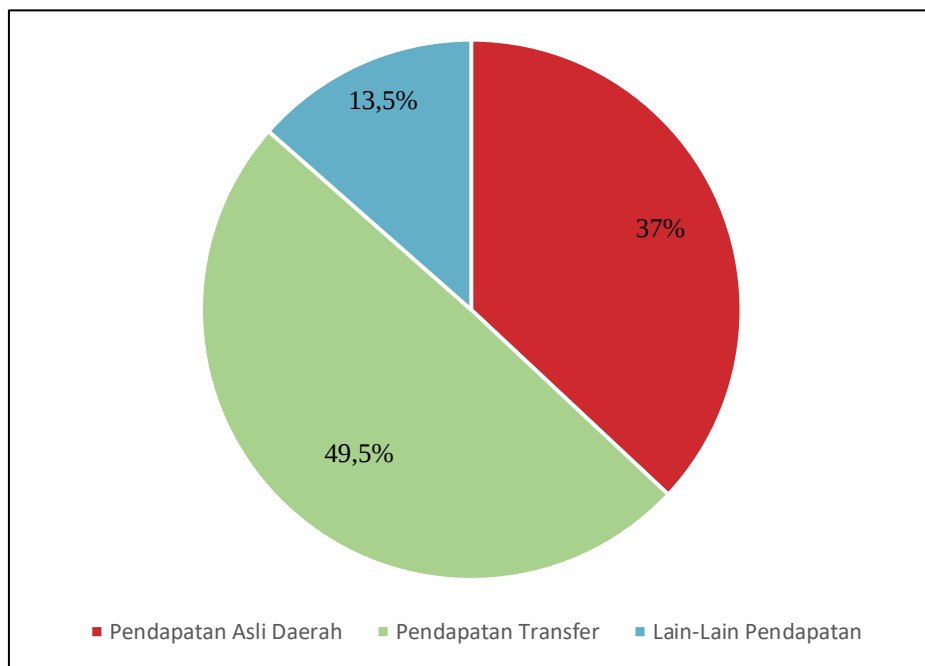
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019 (data diolah)

Gambar 1.1

**Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2017 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai 2017 tidak stabil. Terjadi penurunan sebanyak Rp261.712.249.000,- pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pesat sebanyak Rp1.613.187.202.000,- pada tahun 2017.

Dapat dilihat juga bahwa pendapatan Provinsi Sumatera Selatan cukup didominasi oleh Pendapatan Transfer, walaupun Pendapatan Transfer turun pada tahun 2015 tetapi masih lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019 (data diolah)

Gambar 1.2
Persentase Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2017

Jika dihitung persentasenya, terlihat jelas dari gambar 1.2 diatas bahwa persentase Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 hampir setengah dari seluruh jumlah Pendapatan Daerah yaitu sebesar 49,5%, sedangkan

persentase Pendapatan Asli Daerah sebesar 37%, selisih 12,5% dari Pendapatan Transfer.

Tabel 1.1
Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan pada 17 Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

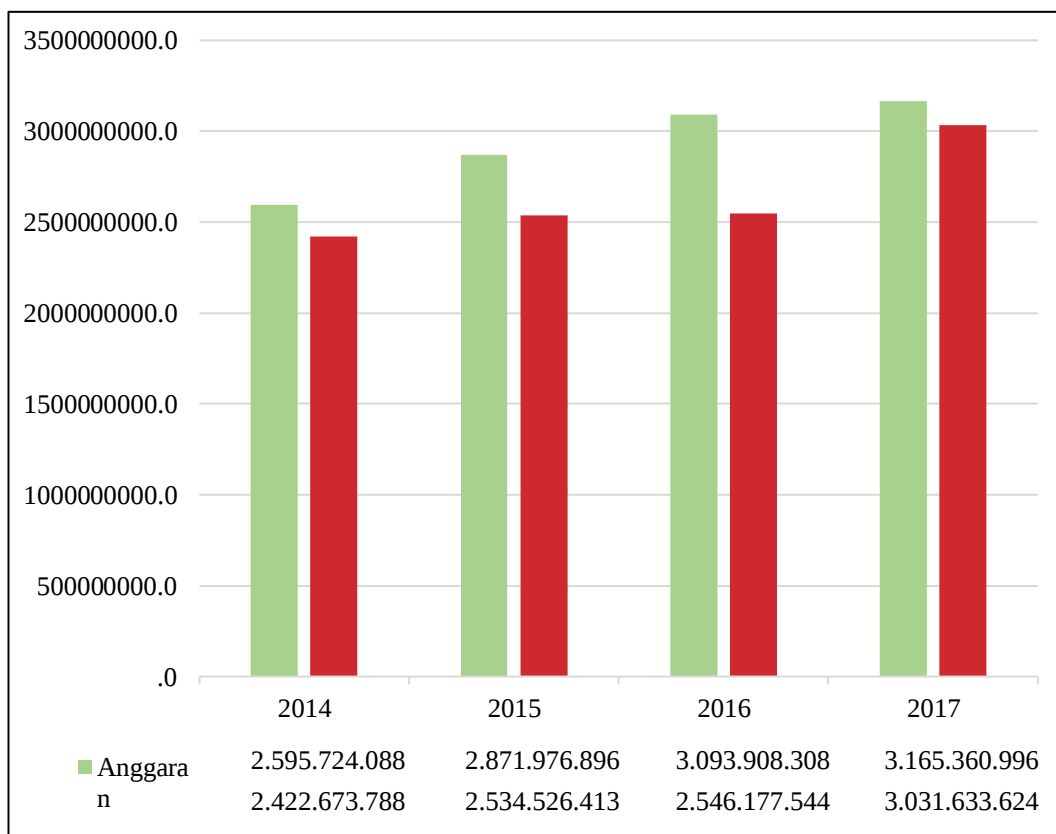
Kabupaten/Kota	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase Kontribusi PAD
OKU	1.396.244.570.642,17	172.013.164.446,13	12,32%
OKI	2.120.350.526.972,1	222.961.997.724,44	10,52%
Muara Enim	2.402.350.260.507,26	226.929.233.264,54	9,45%
Lahat	1.765.015.019.207,69	164.495.177.551,81	9,32%
Musi Rawas	1.549.566.489.528,82	151.594.082.635,49	9,78%
Musi Banyuasin	2.642.776.006.641,88	209.410.035.753,13	7,92%
Banyuasin	2.006.422.252.444,58	125.984.368.887,92	6,28%
OKU Selatan	1.222.264.959.242,97	89.506.598.777,46	7,32%
OKU Timur	1.599.418.326.412,06	77.706.784.295,93	4,86%
Ogan Ilir	1.363.217.799.739,98	95.711.837.735,90	7,02%
Empat Lawang	904.327.377.340,57	68.806.714.653,58	7,61%
PALI	992.302.734.752,05	56.934.787.815,97	5,74%
Musi Rawas Utara	785.394.510.490,45	57.580.992.080,77	7,33%
Palembang	3.417.593.733.021,30	1.091.704.605.854,90	31,94%
Prabumulih	895.274.996.495,31	119.192.660.726,34	13,31%
Pagar Alam	812.270.609.974,78	65.538.892.445,17	8,07%
Lubuk Linggau	906.258.990.999,98	115.521.939.795,78	12,75%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PAD setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Kabupaten/kota yang memiliki kontribusi PAD terbesar tahun 2017 adalah Kota Palembang yaitu sebesar Rp1.091.704.605.854,90 atau 31,94% dari total pendapatan daerahnya, sedangkan kontribusi PAD terkecil dimiliki Ogan Komering Ulu Timur yaitu sebesar Rp77.706.784.295,93 atau 4,86% dari total pendapatan daerahnya.

Dapat diketahui juga dari tabel 1.1 tersebut bahwasannya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil. Dari 17 Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Selatan tersebut tidak ada yang mencapai lebih dari 50% pendapatan daerahnya masing-masing.



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019 (data diolah)

Gambar 1.3

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017
(Dalam Ribuan Rupiah)**

Dari gambar 1.3 diatas bisa dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp485.456.080.000,-.

Pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai 2017 belum pernah mencapai target yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah yang hampir mendekati target yaitu pada tahun 2017

selisih sebesar Rp133.727.372.000,-, sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang jauh dari target yaitu pada tahun 2016 selisih Rp547.730.764.000,-. Ini menandakan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.

Tabel 1.2
Perkembangan PDRB di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016-2017 Berdasarkan Harga Konstan 2010
(Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK 2010	
	2016	2017
Ogan Komering Ulu	8.556,15	8.892,49
Ogan Komering Ilir	17.450,46	18.297,69
Muara Enim	32.892,45	35.761,59
Lahat	10.830,61	11.255,34
Musi Rawas	11.647,49	12.254,43
Musi Banyuasin	40.225,89	41.439,12
Banyuasin	17.190,46	18.063,52
Ogan Komering Ulu Selatan	4.951,26	5.174,85
Ogan Komering Ulu Timur	8.805,05	9.039,93
Ogan Ilir	6.431,68	6.761,84
Empat Lawang	3.098,26	3.213,15
Pali	3.930,64	4.165,32
Musi Rawas Utara	4.925,76	5.126,63
Palembang	87.088,35	92.454,78
Prabumulih	4.587,79	4.829,59
Pagar Alam	1.974,61	2.069,29
Lubuk Linggau	3.646,01	3.875,10
Jumlah	268.232,92	282.674,66

Sumber: www.bps.go.id, 2019.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini

merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan PAD.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian skripsi ini terarah dan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sehubungan dengan PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan pada 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2017. Data Penelitian ini diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan www.bps.go.id berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), PDRB, dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pemahaman, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan wawasan penulis.
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu para pihak yang terlibat dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
 - c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan mengenai PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang dapat bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun pihak umum, serta menambah refrensi perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai wacana baru yang dapat menambah wawasan.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.